GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**: Kompas**	**Tgl/Bln/Thn**	**: 23 November 2007**
Subyek	**: Krisis Air**	**Hari**	**: Jumat**
		Halaman	**: 31**

Krisis Air Bersih Berlanjut

Warga Tuntut Kompensasi atas Buruknya Pelayanan PT TPJ

Jakarta, kompas - Krisis air bersih di Jakarta Utara terus berlanjut. Umumnya, suplai air melalui pipa distribusi dari pihak operator, PT Thames Pam Jaya, ke 29 kelurahan di wilayah itu masih tersendat. Kalaupun suplai mulai normal, kualitas airnya masih buruk, tak bisa digunakan karena berwarna dan berbau busuk.

Tarmizin (45), warga yang menetap di belakang Kantor Kelurahan Semper Barat, Kamis kemarin marah-marah. ”Kalau kami terlambat membayar tagihan bulanan dalam satu atau dua hari saja, sudah langsung didenda. Sekarang, air keran di rumah sudah tujuh hari mati total, kering kerontang. Pelanggan mestinya dibebaskan dari biaya beban atau tagihan bulan depan,” katanya.

Pipa distribusi di seluruh Kelurahan Semper Barat hingga kemarin masih kering. Jika dihitung sejak mesin pompa rusak di Buaran pada Jumat lalu, berarti hingga kemarin sudah tujuh hari warga mengalami krisis air bersih.

”Sebelumnya, petugas TPJ (Thames Pam Jaya) menjanjikan suplai normal lagi hari Rabu (21/11), tetapi hingga Kamis sore air tak ada juga. Sungguh mengecewakan,” kata Lurah Semper Barat Fredy Setiawan.

Pasar-pasar tradisional, kantor pemerintah, termasuk kompleks Markas Polres Metro Jakarta Utara di Kelurahan Rawa Badak Utara, juga krisis air. ”Kami terpaksa beli air. Tidak usah tanya harganya, yang pasti mahal,” ujar Kepala Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Musyafak.

”Saya setiap bulan membayar tagihan air Rp 80.000. Kalau terlambat sehari sudah didenda Rp 5.000. Bisa lebih besar lagi atau berupa pemutusan jaringan dan meteran,” kata Muhammad bin Dharman (20), warga RT 003 RW 18, Tugu Utara.

Mestinya konsumen terus mendesak agar pelayanan yang buruk terhadap masyarakat seperti yang dilakukan TPJ itu juga diberi sanksi, misalnya pemberian kompensasi kepada warga.

Hingga kemarin, 29 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Tanjung Priok, Cilincing, dan Koja belum keluar dari krisis air tersebut. Di beberapa kelurahan, suplai air memang sudah mulai normal, tetapi kualitasnya buruk, air berwarna, bercampur lumpur sehingga tidak bisa diminum.

”Air memang mengalir sedikit demi sedikit sejak dua hari lalu. Namun airnya berwarna kuning keruh, menebarkan aroma tak sedap, atau bau yang tajam. Jelas belum bisa diminum. Kami masih membeli air galon. Juga dengan mobil tangki yang dipinjam dari kelurahan tetangga,” ungkap Lurah Cilincing Mugiono Tugiman.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Dampak dari krisis air itu ialah meningkatnya biaya hidup. ”Uang yang semula disimpan untuk belanja kebutuhan lain, seperti beras dan minyak tanah, diambil buat membeli air. Kami terbebani,” kata seorang warga.

Pipa bocor

Devy A Yheanne, Manajer Humas Thames Pam Jaya, mengakui, walaupun kapasitas produksi telah mencapai 90 persen, distribusi kepada pelanggan masih terganggu. Pada saat normal, kapasitas produksi mencapai 9.000 liter per detik.

”Pelanggan yang letaknya jauh dari pompa, seperti pelanggan di Jakarta Utara, pasti masih mengalami gangguan. Hal ini disebabkan pelanggan di sekitar pompa tentu membuka keran airnya besar sehingga pelanggan yang letaknya jauh tidak kebagian. Selain itu, ada laporan kebocoran pipa primer di Jalan Sindang Melati, Sindang,” kata Devy.

Kebocoran itu cukup lebar, yakni 40 sentimeter, sehingga memengaruhi kualitas air dan suplai ke Jakarta Utara. Kebocoran di pipa primer itu disebabkan pembangunan proyek persiapan antisipasi banjir.

Mengenai kualitas, Devy mengatakan, air masih keruh karena terjadi pengendapan di pipa selama pompa mati. Ketika air sudah bisa dialirkan, endapan itu akan terbawa aliran air.

Menanggapi soal tuntutan konsumen soal kompensasi akibat terganggunya pasokan air bersih sejak Jumat lalu, Devy belum bisa memberikan informasi. ”Kompensasi ini harus dibicarakan dulu kepada PAM Jaya karena status kami hanya sebagai operator. Semua keputusan harus melalui PAM Jaya,” ujar Devy. (CAL/ARN)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP